

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki era *society* 5.0, implementasi penggunaan teknologi sudah mulai memperhatikan aspek-aspek humaniora guna menciptakan berbagai *tools* pada proses pemecahan masalah-masalah sosial yang ada (Faruqi, 2019:67). Era *Society* 5.0 dimana tantangannya adalah masyarakat akan bertumpu pada kemampuan untuk menjadi manusia penyeimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh system yang mengintegritaskan antara ruang dunia maya dan ruang dunia fisik yang akan menjadi tumpuan permasalahan dalam pemberdayaan pembangunan ekonomi.

Melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan yang sudah banyak dilakukan pada sektor publik, untuk memaksimalkan produktivitas hasil kerja yang dilaksanakannya (Yudoprakoso, 2019:453). Dengan demikian, penerapan teknologi kecerdasan buatan akan dapat memberikan manfaat untuk membantu memperoleh informasi melalui pengumpulan data yang dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan sistem otomatisasi di masa depan (Saluky, 2018:2).

Era *society* 5.0 memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat (Wasitarini, 2019:28).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan pentingnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan berbentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Suratno, 2016:13).

Dengan demikian pembangunan daerah perlu didasarkan pada potensi fisik, sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut (Siregar *et.al*,2021:46). Untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat dengan mengelola potensi dan sumber-sumber kekayaan di daerah tersebut maka dibentuk salah satu sarana kebijakan yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Halim A, 2014: 38). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Oleh karena itu perlu peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik sehingga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berkembang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah.

Menurut (Saragih, 2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut (Darwanto, 2017) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dari selisih pendapatan dengan rencana belanja daerah . Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada realisasi anggaran pendapatan belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. Menurut data BPS tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi, belanja

daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Nias pada tahun 2019 sebesar 5,04% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,80%. Belanja daerah Kabupaten Nias pada tahun 2019 sebesar 975.280.101.395 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni sebesar 902.078.522.718,00. Pembiayaan daerah Kabupaten Nias pada tahun 2019 sebesar 89.319.014.854 dan menurun pada tahun 2020 yakni 77.265.717.562,60.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 sebesar 5.30% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar -0.94%. Belanja daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 sebesar 1.617.408.773.044 dan pada tahun 2020 sebesar 1.559.758.322.079,39. Pembiayaan daerah Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2019 sebesar 50.326.508.396 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 116.116.603.125,53.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2019 sebesar 5.18% dan pada tahun 2020 sebesar -0.76%. Belanja daerah Kabupaten Tapanuli pada tahun 2019 yakni sebesar mengalami kenaikan yakni 1.463.791.932.224 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 1.350.731.462.450,00. Dan pada pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2019 yakni sebesar (136.554.609.854) dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 87.492.187.600,62.

Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 sebesar 5.18% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni sebesar -0.76 %. Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 sebesar 1.226.312.258.777 dan pada tahun 2020 mengalami 1.262.417.323.849,92.

Pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 sebesar 94.689.007.033 dan naik sebesar 118.989.528.371,21 pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 4.62 % dan mengalami penurunan sebesar 1,50% pada tahun 2020. Pada belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019 yakni sebesar 1.306.760.873.867 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 1.486.351.970.646,00. Pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 44.674.759.487 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 292.165.422.420,00

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2019 yakni sebesar 4.88% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,27%. Belanja daerah Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2019 yakni sebesar 1.061.087.958.908 dan pada tahun 2020 sebesar 997.957.281.587,50. Pembiayaan daerah Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2019 sebesar 39.265.305.517 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 53.370.346.887,62.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2019 yakni sebesar 5,07% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 0.09%. Belanja daerah Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2019 sebesar 1.367.519.966.302 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.187.860.181.508,26. Pembiayaan daerah Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2019 sebesar 80.571.611.165 dan tahun 2020 yakni sebesar 31.373.688.183,84.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan pada tahun 2019 yakni sebesar 5.46% dan menurun sebesar 0,21% pada tahun 2020. Belanja daerah Kabupaten

Asahan pada tahun 2019 sebesar 1.775.230.082.118 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.603.180.726.931,23. Pembiayaan daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2019 sebesar 70.957.026.595 dan penurunan sebesar 17.569.327.159,89.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 yakni sebesar 5,20% dan menurun sebesar 1,01% pada tahun 2020. Belanja daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 sebesar 2.309.883.968.686 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.138.512.292.658,24. Pembiayaan daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2019 sebesar 50.094.585.624 dan mengalami kenaikan sebesar 73.845.738.880,97 pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2019 yakni sebesar 4,82% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,94%. Belanja daerah Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 1.131.108.532.277 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.058.398.984.995,80. Pembiayaan daerah Kabupaten Dairi pada tahun 2019 sebesar 87.947.135.466 dan tahun 2020 yakni sebesar 118.344.644.077,89.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo pada tahun 2019 yakni sebesar 4,60% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,80%. Belanja daerah Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 1.530.469.300.383 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.332.057.897.515,00. Pembiayaan daerah Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 346.074.583.745 dan tahun 2020 yakni sebesar 239.126.177.561,13.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 yakni sebesar 5,18% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -1,78%. Belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 sebesar 3.601.407.369.876 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 3.274.161.220.722,19. Pembiayaan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 sebesar 111.708.970.968 dan tahun 2020 yakni sebesar 79.028.990.701,79.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat pada tahun 2019 yakni sebesar 5,07% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,86%. Belanja daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sebesar 2.224.061.799.668 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 2.183.224.861.799,75. Pembiayaan daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sebesar 127.487.984.419 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 257.575.963.312,36.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2019 yakni sebesar 5,03% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 0,61%. Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2019 sebesar 1.308.864.755.914 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.555.765.442.954,26. Pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2019 sebesar 106.641.748.378 dan tahun 2020 yakni sebesar 109.180.580.762,71.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 yakni sebesar 4,94% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,13%. Belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 sebesar 990.766.984.359 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 940.578.083.348,50. Pembiayaan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada

tahun 2019 sebesar 122.318.955.320 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 137.666.646.699,50.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 yakni sebesar 5,87% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,18%. Belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 sebesar 583.790.802.603 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 494.551.479.604,00. Pembiayaan daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2019 sebesar 52.371.661.747 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 59.428.315.941,58.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir pada tahun 2019 yakni sebesar 5,70% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,59%. Belanja daerah Kabupaten Samosir pada tahun 2019 sebesar 855.013.190.480 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 808.468.951.865,47. Pembiayaan daerah Kabupaten Samosir pada tahun 2019 sebesar 20.437.136.066 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 46.535.103.639,88.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019 yakni sebesar 5,28% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,44%. Belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019 sebesar 1.574.125.427.282 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.519.836.305.731,22. Pembiayaan daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019 sebesar 70.730.404.600 dan tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 68.993.255.249,44.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara pada tahun 2019 yakni sebesar 4,35% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,31%. Belanja daerah

Kabupaten Batu Bara pada tahun 2019 sebesar 1.197.832.798.934 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.211.126.094.608,20. Pembiayaan daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2019 sebesar 132.231.615.066 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 140.741.765.804,99.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2019 yakni sebesar 5,61 dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 1,11. Belanja daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2019 sebesar 1.190.735.750.5604 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.082.375.067.023,80. Pembiayaan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2019 sebesar 16.572.099.964 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 23.860.569.747,59.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2019 yakni sebesar 5,64% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 1,18%. Belanja daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2019 sebesar 1.142.744.160.431 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 1.035.264.004.104,00. Pembiayaan daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2019 sebesar 54.000.442.330 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 45.698.121.224,00.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2019 yakni sebesar 5,35% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 0,80%. Belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2019 sebesar 948.922.810.033 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 832.891.171.093,00. Pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada

tahun 2019 sebesar 51.584.491.407 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 72.394.348.641,00.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2019 yakni sebesar 5,15% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 0,27%. Belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2019 sebesar 1.136.528.034.058 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 977.399.204.792,68. Pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2019 sebesar 149.977.181.349 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 96.096.590.302,55.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Utara pada tahun 2019 yakni sebesar 4,65% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 1,58%. Belanja daerah Kabupaten Nias Utara pada tahun 2019 sebesar 839.420.196.412 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 815.700.719.693,41. Pembiayaan daerah Kabupaten Nias Utara pada tahun 2019 sebesar 13.351.561.488 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 55.877.947.296,63.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Barat pada tahun 2019 yakni sebesar 4,82% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 1,66%. Belanja daerah Kabupaten Nias Barat pada tahun 2019 sebesar 710.214.298.476 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 671.175.299.294,08. Pembiayaan daerah Kabupaten Nias Barat pada tahun 2019 sebesar 26.175.138.603 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 60.546.152.080,73.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga pada tahun 2019 yakni sebesar 5,20 dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -1,36. Belanja daerah Kota Sibolga pada tahun 2019 sebesar 581.264.116.047 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 568.424.346.936,09. Pembiayaan daerah Kota Sibolga pada tahun 2019 sebesar 14.806.771.307 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 38.469.824.145,57.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Balai pada tahun 2019 yakni sebesar 5,79% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,47%. Belanja daerah Kota Tanjung Balai pada tahun 2019 sebesar 648.476.982.904 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 596.906.909.800,39. Pembiayaan daerah Kota Tanjung Balai pada tahun 2019 sebesar 5.257.946.833 dan tahun 2020 menurun yakni sebesar 2.155.399.718,33.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 yakni sebesar 4,82% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -1,89%. Belanja daerah Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 sebesar 934.784.426.979 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 911.986.217.295,00. Pembiayaan daerah Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 sebesar 52.228.270.338 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 119.184.873.308,00.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,15% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,70%. Belanja daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 sebesar 691.772.850.871 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 654.635.722.675,66. Pembiayaan daerah Kota

Tebing Tinggi pada tahun 2019 sebesar 10.414.169.785 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 22.908.028.317,00.

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2019 yakni sebesar 5,93% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -1,98%. Belanja daerah Kota Medan pada tahun 2019 sebesar 5.060.725.686.081 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 3.993.254.230.493,55. Pembiayaan daerah Kota Medan pada tahun 2019 sebesar 48.608.840.240 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 494.099.366.078,37.

Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai pada tahun 2019 yakni sebesar 5,51% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -1,83%. Belanja daerah Kota Binjai pada tahun 2019 sebesar 905.176.183.078 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 879.245.168.648,12. Pembiayaan daerah Kota Binjai pada tahun 2019 sebesar 2.857.327.879 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 6.925.408.047,97.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidempuan pada tahun 2019 yakni sebesar 5,51% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni -0,73%. Belanja daerah Kota Padangsidempuan pada tahun 2019 sebesar 846.228.537.276 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 689.740.622.683,36. Pembiayaan daerah Kota Padangsidempuan pada tahun 2019 sebesar (257.480.187) dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 34.004.288.996,8.

Pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada tahun 2019 yakni sebesar 6,05% dan mengalami penurunan sebesar 2020 yakni 0,38%. Belanja daerah

Kota Gunungsitoli pada tahun 2019 sebesar 732.295.074.461 dan menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 719.249.942.772,00. Pembiayaan daerah Kota Gunungsitoli pada tahun 2019 sebesar 41.491.235.587 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yakni sebesar 38.935.675.160,00.

Tabel I.1
Laporan Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011-2021

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Belanja Daerah (Rp.) | Pembiayaan Daerah (Rp.) |
|-------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2011 | 5,15 | 1.654.873.747.938 | 37.067.805.627 |
| 2012 | 4,99 | 1.826.070.426.059 | -22.075.978.707 |
| 2013 | 9,22 | 2.034.622.488.869 | -8.973.325.203 |
| 2014 | 7,67 | 2.392.252.735.840 | 52.834.923.474 |
| 2015 | 5,25 | 2.735.624.354.971 | 110.146.204.341 |
| 2016 | 5.32 | 3.005.435.386.844 | 151.705.979.049 |
| 2017 | 5.10 | 3.377.738.242.084 | 244.627.938.572 |
| 2018 | 5.15 | 3.422.610.573.015 | 182.485.240.597 |

| | | | |
|------|-------|----------------------|-------------------|
| 2019 | 5.18 | 3.601.407.369.876 | 111.708.970.968 |
| 2020 | -1.78 | 3.274.161.220.722,19 | 79.028.990.701,79 |
| 2021 | 2,23 | 3.473.760.778.916 | 126.859.764.508 |

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel I.2 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami kenaikan dari 6,01 ke 6,06. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan yakni sebesar 9,22 dan menurun sebesar 7,50 pada tahun 2014 dan begitu juga pada tahun 2015 kembali mengalami menurun sebesar 5,24. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,32 dan pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar 5,10. Pada tahun 2018 terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali naik sebesar 5,18 dan pada tahun 2020 terjadinya penurunan secara signifikan yakni sebesar -1,78 dan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi naik yakni sebesar 2,23.

Sedangkan, laporan realisasi anggaran pada belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 1.826.070.426.059 yang mengalami kenaikan dari tahun 2011 yaitu Rp. 1.654.873.747.938. Pada tahun 2013 belanja daerah terus mengalami kenaikan hingga tahun 2015, di tahun 2013 yakni sebesar Rp. 2.034.622.488.869, tahun 2014 sebesar Rp. 2.392.252.735.840 dan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 2.735.624.354.971. Pada tahun 2016 kembali naik yaitu sebesar Rp. 3.005.435.386.844 kemudian

pada tahun 2017 dan 2018 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.377.738.242.084 dan Rp. 3.422.610.573.015 dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.601.407.369.876 namun pada tahun 2020 belanja daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 3.274.161.220.722,19. Dan pada tahun 2021 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.473.760.778.916.

Pada pembiayaan daerah di Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 menunjukkan sebesar Rp. 151.705.979.049 kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 244.627.938.572. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 182.485.240.597 begitu juga pada tahun 2019 dan 2020 pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 111.708.970.968 dan Rp. 79.028.990.701,79

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada produk domestik bruto hasil dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor. Apabila produk domestik bruto menurun dalam waktu yang lama maka bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau kota sedang melemah atau mengalami resesi.

Naik Turunya Belanja daerah dikarenakan penyerapan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berbeda setiap tahunnya yang disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan.

Pembiayaan daerah mengalami fluaktif dikarenakan sisa lebih anggaran pada tahun sebelumnya, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran

pembiayaan daerah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pengelolaan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Deli Serdang dikarenakan produk domestik bruto menurun dalam waktu yang lama sehingga pertumbuhan ekonomi akan mengalami resesi.

2. Penyebab menurunnya belanja daerah dikarenakan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berbeda setiap tahunnya yang disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

3. Menurunnya pembiayaan daerah dikarenakan berkurangnya anggaran penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga pembiayaan daerah yang diperoleh suatu pemerintah daerah dapat menutupi defisit anggaran.

1.3. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Menurut (Winarno Surakhmad 1990:3), batasan masalah diperlukan untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah untuk menetapkan terlebih dahulu sesuatu yang mendukung pemecahan dengan dibatasi oleh keadaan waktu, tenaga, kecakapan. Selain itu juga menghindari terlalu luasnya masalah yang akan dibahas. Adapun batasan masalah penelitian ini yaitu mengarah pada Analisis Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Menghadapi Era Society 5.0 Di Kabupaten Deli Serdang.

1.3.2. Rumusan Masalah

Menurut (Suharsimi Arikunto 1998:43), rumusan masalah adalah dasar dalam membuat hipotesis, dimana didalamnya harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, masalah harus jelas dan padat dan biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang ?
3. Apakah belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah belanja daerah dan pembiayaan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan menambah kemampuan pemahaman, khususnya dalam bidang belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang
2. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi demi kemajuan daerah
3. Bagi pihak lain. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi atau kajian untuk dijadikan perbandingan terhadap penelitian sejenisnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Belanja Daerah

2.1.1.1. Pengertian Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (UU 23 Tahun 2014). Anggaran Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan berdasarkan susunan organisasi daerah seperti setda, dinas daerah dan lembaga teknis dinas daerah lainnya. Klasifikasi belanja menurut fungsinya didasarkan pada urusan kewenangan pemerintah daerah seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Klasifikasi belanja

menurut jenis belanja, anggaran belanja dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

2.1.1.2. Jenis-jenis Belanja Daerah

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja, anggaran belanja dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:42), belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya, yang umumnya diperlukan secara periodik.

Karakteristik belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut:

1. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan)

2. Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan, dan
8. Belanja tidak terduga.

Soleh dan Rochmansjah (2010:46) menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut:

1. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan.
2. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
3. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai

2. Belanja barang dan jasa, dan

3. Belanja modal.

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Menurut konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pembayaran honorarium bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap dianggap merupakan bagian dari kegiatan. Dengan konsep tersebut pegawai honorer/pegawai tidak tetap adalah bagian dari kegiatan, sehingga termasuk dalam kelompok langsung. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Belanja Barang dan Jasa yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berupa belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor.

2.1.2. Pembiayaan Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Soleh dan Rochmansjah (2010:47) mengatakan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis pembiayaan.

Menurut undang-undang PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang menjelaskan bahwa APBD diperkirakan mengalami surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah (investasi daerah), pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD yang diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Sumber pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pinjaman daerah.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Pembiayaan Daerah

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 70 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan

f. Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. Pembentukan dana cadangan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

c. Pembayaran pokok utang, dan

d. Pemberian pinjaman daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada periode tahun sebelumnya. Nilai SiLPA pada tahun sebelumnya akan digunakan dalam APBD tahun berjalan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan terbesar dalam rangka menutup defisit daerah. Adapun faktor yang mendorong terjadinya SiLPA antara lain pelampauan target pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah yang kurang optimal.

Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit APBD Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Boediono (1998:3) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator

pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal.

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Menurut (Manurung, 2013:63) “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (structural transformation), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun

tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

- 1) Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
- 2) Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
- 3) Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, betapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Boediono (1998):

a. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 (satu) tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB maupun PDRB adalah ukuran yang global sifatnya, dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai, karena belum dapat mensejahterakan penduduk yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap negara maupun daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Perkapita/Pendapatan perkapita

Produk Domestik Bruto Perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada skala yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah yang lebih baik karena dapat mencerminkan kesejahteraan

penduduk suatu negara maupun daerah yang bersangkutan dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk Domestik Bruto Perkapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Siti Fatimah, Yusuf Hasbunallah (2020) | Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic | Variabel Independen: Belanja Daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak) | Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pengaruh Belanja Daerah Terhadap |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019 | Langsung Variabel Dependen: Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Barat Cenderung Berfluaktif |
| 2. | Jacelin Joice Limpele, Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021) | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara | Variabel Independen: Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi | Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, Belanja Daerah tidak memberikan pengaruh pengaruh |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara, Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara, Belanja langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhan</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|-------------------------|---|---|--|
| | | | | Ekonomi secara bersama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara |
| 3. | Moch.Chamdani (2015) | Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tangerang Tahun 2008 – 2014. | Variabel Independen: Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung Variable Dependent: Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB | tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang., Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | | ekonomi di kabupaten Tangerang. Kemudian secara bersama-sama terbukti terdapat pengaruh simultan dan signifikan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang. |
| 4. | Andika Yasa, Suswanta, M. Rafi, Fajar Rahmanto, Deni Setiawan, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman (2021) | Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 Di Indonesias | Variabel Independen : Birokrasi Bersih Transparan Dan Akuntabel, Perubahan Era Dan | Hasil pengujian menunjukkan bahwa penguatan reformasi birokrasi menuju era society 5.0 di indonesia |

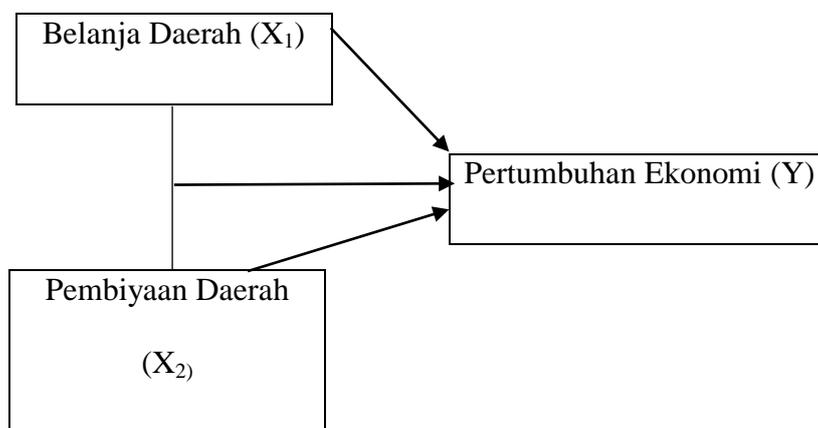
| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Perkembangan Teknologi Variabel Dependen: Birokrasi Society 5.0</p> | <p>mengalami berbagai hambatan terkait masih dominannya patologi birokrasi, budaya korupsi, serta ketidakpastian birokrasi akan pemanfaatan teknologi dan perkembangan SDM aparatur oleh KemenPANRB dalam memperkuat reformasi birokrasi menuju era Society 5.0 harus dilakukan secara tepat dengan merespons berbagai hambatan yang terjadi serta segala bentuk perubahan lingkungan dan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|
| | | | | perkembangan zaman. |
| 5. | Taher Salbia, Antje Tuasela (2019) | Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika | Variabel Independen: Belanja Daerah Variable Dependent: Pertumbuhan Ekonomi | Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Mimika terutama dalam aspek pengeluaran pemerintah belum |

| | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|
| | | | | mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika |
| 6. | Ihsan Sahrul (2020) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan dana Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Lombok Timurnusa Tenggara Barat | Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Pembiayaan Variable Dependent: Pertumbuhan Ekonomi | Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga dana pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi |

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model kerangka berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Gambar 2.1 menyajikan kerangka konseptual untuk pembangunan hipotesis pada penelitian ini. Variabel penelitian ini yaitu variabel independen Belanja daerah dan Pembiayaan Daerah untuk variabel tambahan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

2.4. Hopotesis

Sugiyono (2014:69) menyebutkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung pernyataan. Hipotesis merupakan pernyataan

penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho₁: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Ha₁: Terdapat pengaruh signifikan variabel belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2. Ho₂: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Ha₂: Terdapat pengaruh signifikan variabel pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
3. Ho₃: Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Ha₃: Terdapat pengaruh signifikan variabel belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.